

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Konteks Penelitian

Pendidikan mempunyai kontribusi yang sangat besar bagi kemajuan suatu bangsa, selain menjadi wahana penerjemahan pesan-pesan konstitusi dan sarana dalam upaya pembangunan watak bangsa (*nation character building*).

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional pada pasal 1 menyatakan bahwa, Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara. Pendidikan merupakan usaha agar manusia dapat mengembangkan potensi dirinya melalui proses pembelajaran dan/atau cara lain yang dikenal dan diakui oleh masyarakat.<sup>1</sup>

Sumber daya manusia sebagai masukan utama dalam pendidikan secara psikologis adalah makhluk yang mampu berpikir, bersikap dan memiliki potensi. Oleh karena itu keluaran yang harus dicapai adalah manusia mandiri yaitu manusia yang memiliki kemampuan memahami diri, mengarahkan diri dan beradaptasi dengan lingkungan dimanapun dia berada dengan mengacu pada ilmu pengetahuan dan teknologi dan dilandasi oleh keimanan dan ketaqwaan yang mumpuni.

---

<sup>1</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional

Dalam dunia pendidikan, khususnya pada sekolah sebagai satuan lembaga penyelenggara pendidikan formal, sumber daya manusia meliputi banyak pihak yang turut berkontribusi dalam upaya mensukseskan terwujudnya tujuan pendidikan itu sendiri. Sumber daya manusia yang terdapat di sekolah mencakup kepala sekolah, guru, siswa, pegawai sekolah, komite sekolah, alumni dan masyarakat lingkungan sekitar.

Dengan segenap potensi yang ada dan melekat pada tiap-tiap individu, maka selayaknyalah upaya pendidikan mampu menjadikan manusia-manusia yang terdidik menjadi suatu kesatuan masyarakat yang mandiri. Sekolah dengan keseluruhan sumber daya manusia yang dimilikinya pun harus dapat menjadi mandiri. Salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah dengan memberdayakan sumber daya manusia yang dimiliki.

Guru sebagai bagian sumber daya manusia sekolah yang memiliki posisi strategis dalam pelaksanaan tugasnya menjadi salah satu yang paling potensial untuk diberdayakan. Hal ini dikarenakan guru adalah pihak yang berinteraksi langsung dengan siswa dalam melakukan tugas mengajar dan guru juga memiliki andil dalam pengambilan keputusan sekolah.

Keberdayaan tidak datang dengan sendirinya, diperlukan satu upaya pemberdayaan yang realistis dalam upaya mengembangkan potensi yang dimiliki oleh masing-masing individu guru. Ada berbagai faktor yang melatarbelakangi berkembangnya potensi guru untuk menjadi berdaya. Di antaranya adalah adanya stimulus yang diberikan untuk merangsang

motivasi internal guru untuk menjadi berdaya dan adanya upaya peningkatan kesadaran dan pelatihan kemampuan.

Kesadaran menjadi penting sebab dorongan terbaik untuk suatu perubahan hendaknya datang dari dalam diri individu yang bersangkutan. Ditambah upaya peningkatan kesadaran dan pelatihan kemampuan baik dalam bentuk pemberian akses informasi, pemartisipasian, pendidikan dan latihan yang diselenggarakan baik oleh sekolah maupun pemberian izin mengikuti pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan oleh pihak luar sekolah, serta pelibatan guru dalam mensukseskan program-program sekolah.

Pada proses pemberdayaan, kemampuan untuk memahami dan mengendalikan keadaan sangat diperlukan. Dengan kata lain pemberdayaan adalah upaya edukasi yang bertujuan membangkitkan kesadaran dan kepekaan individu terhadap lingkungan sekitar tempatnya berada sehingga memiliki kemampuan untuk memperbaiki dan meningkatkan kedudukannya.

Memasuki era reformasi, terdapat banyak perubahan pada berbagai bidang kehidupan seperti politik, moneter, hankam dan kebijakan mendasar lainnya. Di antaranya lahir Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Otonomi Daerah dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah yang membawa implikasi pada bidang-bidang kewenangan daerah menjadi lebih otonom, termasuk pada bidang pendidikan.

Manajemen berbasis sekolah berlaku sejak dikeluarkannya UU No.20 Tahun 2003 pasal 51 ayat 1, yang berbunyi “Pengelolaan satuan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah dilaksanakan berdasarkan standar pelayanan minimal dengan prinsip manajemen berbasis sekolah atau madrasah”.<sup>2</sup> Sejalan dengan hal ini Tilaar juga menyatakan:

Dalam era ini, sekaligus telah kita letakkan dasar pembangunan nasional untuk tahap selanjutnya. Dasar yang kokoh menjadi amat penting bagi setiap dasar pembangunan. Apabila dasarnya rapuh karena tidak tertumpu pada kekuatan sosial budaya dan politik yang kuat, maka upaya pembangunan nasional selanjutnya bukan saja akan terhambat, bahkan dapat runtuh di tangan jalan. Kestinambungan suatu pembangunan sangat mutlak, karena hakikat pembangunan adalah akumulasi usaha dan peningkatan hasil bagi kehidupan yang semakin tinggi kualitasnya.<sup>3</sup>

Keputusan yang digariskan dalam haluan negara untuk mengarahkan desentralisasi pengelolaan pendidikan menuntut adanya partisipasi aktif dari masyarakat untuk merealisasikan otonomi daerah. Maka diperlukan pula kesiapan sekolah yang menjadi ujung tombak implementasi operasional pendidikan pada tataran paling bawah. Otonomi daerah yang merupakan kebijakan politik pada tingkat makro memberikan dampak pada otonomi sekolah yang menjadi sub sistem dalam kesatuan sistem pendidikan nasional.

Seiring berjalannya waktu dan dengan masuknya era globalisasi, dunia pendidikan menghadapi permasalahan yang semakin kompleks dan

---

<sup>2</sup> *Ibid.*

<sup>3</sup> H.A.R.Tilaar. *Manajemen Pendidikan Nasional*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2006). h. 3

mendasar. Ditambah dengan pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang diikuti dengan revolusi pada sektor industri yang tidak terbendung menyebabkan transformasi sosial yang banyak meresahkan masyarakat. Oleh karenanya pendidikan menjadi jawaban atas semua permasalahan tersebut.

Dalam kondisi apa pun komitmen pemerintah dalam meningkatkan kuantitas maupun kualitas pendidikan hendaknya tidak berubah. Berbagai program yang dilaksanakan memberi harapan bagi keberlangsungan kualitas pendidikan Indonesia pada masa-masa kritis. Namun karena pengelolaan yang terlalu kaku dan sentralistik, menjadikan berbagai program yang diluncurkan tidak banyak memberikan dampak positif. Diduga erat kaitannya dengan masalah manajerial.

Berkaitan dengan hal ini, muncul pemikiran yang mengarah pada pengelolaan pendidikan yang memberi keleluasaan pada sekolah untuk mengatur dan menjalankan kebijakannya secara luas. Pemikiran ini disebut manajemen berbasis sekolah (MBS) atau *school-based management* (SBM), yang telah berhasil mengangkat kondisi dan memecahkan berbagai masalah pendidikan di beberapa negara, seperti Australia dan Amerika.<sup>4</sup>

Pemberian kewenangan yang luas pada sekolah merupakan wujud kepedulian pemerintah pada upaya peningkatan mutu pendidikan secara umum. Hal ini juga menuntut pendekatan manajemen yang lebih kondusif di

---

<sup>4</sup> E. Mulyasa, *Manajemen Berbasis Sekolah*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2007, h. 11

sekolah agar dapat mengakomodasi seluruh kebutuhan sekaligus memberdayakan berbagai komponen masyarakat sekolah secara efektif, guna mendukung kemajuan dan sistem yang ada di sekolah dengan lebih optimal.

Pelibatan masyarakat dalam pengelolaan sekolah, menjadikan pemerintah terbantu baik dalam hal kontrol maupun pembiayaan. Keterlibatan kepala sekolah dan guru dalam pengambilan keputusan juga mendorong rasa kepemilikan yang tinggi sehingga mendorong penggunaan sumber daya secara lebih efisien untuk mencapai hasil terbaik. Hal ini merujuk pada kewenangan sekolah dalam mengelola dan mengambil keputusan yang secara langsung berkaitan dengan penyelenggaraan pendidikan oleh sekolah yang merupakan bagian dari unsur manajemen berbasis sekolah. Pemberdayaan masyarakat sekolah hendaknya menjadi jalan dalam mengakomodasi kebutuhan sekolah dengan memanfaatkan sumber-sumber yang dimilikinya secara lebih optimal.

Dari berbagai jenjang pendidikan yang ada, SMK merupakan salah satu yang memiliki keterkaitan sangat erat dengan masyarakat. Masyarakat yang dimaksudkan di sini bukan hanya masyarakat yang tinggal di sekitar lingkungan sekolah, tapi juga keterkaitan antar masyarakat sekolah itu sendiri. Hal ini dikarenakan SMK adalah jenjang pendidikan menengah yang orientasi keluarannya adalah lulusan yang memiliki kompetensi yang

mumpuni. Salah satu SMK yang dapat dijadikan contoh SMK dengan pengelolaan yang cukup baik adalah SMK Negeri 26 Jakarta.

SMK Negeri 26 Jakarta adalah perubahan nama dari STM Negeri Pembangunan Jakarta yang merupakan salah satu dari lima proyek Perintis Sekolah Teknologi Menengah Pembangunan yang diresmikan oleh Presiden RI ke-2 H. M. Soeharto pada 1 Juli 1971. SMK Negeri 26 Jakarta merupakan lembaga pendidikan kejuruan yang bertugas meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang sesuai dengan kebutuhan dunia industri dan masyarakat.

Program pembangunan Indonesia yang dimulai pada tahun 1969 yang dikenal dengan Rencana Pembangunan Lima Tahun (REPELITA) I, melahirkan pemikiran untuk mengadakan pembaharuan pada sistem pendidikan nasional, khususnya pembaharuan pada Sekolah Teknologi Menengah dengan jenjang pendidikan 3-4 tahun mulai dirintis. Sejak awal berdiri hingga saat ini SMK Negeri 26 Jakarta memiliki enam program keahlian yaitu program keahlian Teknik Kendaraan Ringan, Teknik Komputer Jaringan, Teknik Instalasi Listrik, Teknik Elektronika, Teknik Gambar Bangunan dan Teknik Mesin Permesinan.

Sebagai sekolah yang memiliki visi besar “Menjadi yang terbaik dengan mengejar keunggulan prestasi dan berakhlak mulia”, SMK Negeri 26 Jakarta menjadi bagian dari pengemban tugas melakukan peningkatan kualitas SDM. Hal ini kemudian diperjelas dengan adanya misi meningkatkan

kualitas sumber daya manusia dengan mengikuti program pendidikan, latihan dan pengembangan.

Kualitas SDM yang ditingkatkan bukan hanya kualitas guru selaku pendidik, tapi juga kualitas siswa dan alumni yang dimiliki. Salah satu cara yang dilakukan sebagai upaya peningkatan kualitas SDM adalah dengan melakukan pemberdayaan. Diharapkan SDM yang berdaya bukan hanya akan meningkatkan kualitas dirinya pribadi, tapi juga meningkatkan kualitas SMK Negeri 26 Jakarta.

SMK Negeri 26 Jakarta pada dasarnya memiliki potensi SDM yang secara kuantitatif cukup potensial. Terdapat lebih dari 1400 siswa yang terbagi dalam enam program keahlian yang semuanya terakreditasi A dan jumlah tenaga kepegawaian yang seluruhnya berjumlah 123 orang tenaga pendidik dan tenaga kependidikan untuk melayani seluruh kegiatan sekolah dan proses pembelajaran yang dilaksanakan.

Dari total 123 tenaga pendidik dan kependidikan yang dimiliki, 72 orang guru berstatus PNS dan 22 orang guru berstatus guru tidak tetap/honorer dengan kualifikasi minimum S1 dan bersertifikasi profesi keahlian. Bukan hanya itu, tercatat lebih dari 4.600 alumni masih terjalin dalam Ikatan Alumni STM Pembangunan (IASPEM). Para alumni masih menjalin hubungan dan komunikasi yang baik dengan pihak SMK Negeri 26 Jakarta.



Pembagian beban kerja terutama untuk tenaga pendidik dilakukan dengan berdasarkan pada latar belakang ilmu yang dimiliki masing-masing individu dengan menacu pada ketentuan yang berlaku. Jika pun ada guru yang mengajar tidak sesuai latar belakang pendidikan yang dimiliki, hal itu dikarenakan terdapat beberapa mata ajar yang belum ada penjurusannya di Perguruan Tinggi.

SMK Negeri 26 Jakarta memiliki siswa-siswa yang cukup berprestasi, hal ini dapat dibuktikan dengan banyaknya prestasi yang diraih. Salah satunya adalah diukirnya sejarah untuk pertama kalinya bagi Kota Administrasi Jakarta Timur menjadi juara umum Lomba Keterampilan Siswa (LKS) Tingkat Provinsi DKI Jakarta pada tahun 2009. Selain itu SMK Negeri 26 Jakarta juga secara rutin mengirimkan perwakilan siswa untuk mengikuti ajang Olimpiade Sains dan Teknologi Nasional (OSTN).

Siswa-siswa yang akan mengikuti olimpiade akan mengalami pembinaan tambahan secara khusus dan difasilitasi baik secara langsung maupun tidak langsung oleh pihak sekolah. Selain pembinaan akademik, terdapat pula pembinaan keagamaan yang diberlakukan bagi keseluruhan siswa khususnya yang beragama Islam.

Pembinaan keagamaan ini dilakukan dalam format tutor sebaya atau di lingkungan setempat akrab disebut mentoring. Mentoring ini merupakan pembinaan yang dilakukan oleh unit sekolah dengan memanfaatkan alumni-alumni yang sebelumnya sudah mendapat pembinaan dengan mengacu

pada silabus mata ajar pendidikan agama Islam yang digunakan oleh SMK Negeri 26 Jakarta.

Selain turut berpartisipasi aktif dalam kegiatan mentoring, bentuk lain dari partisipasi yang dilakukan oleh para alumni di antaranya adalah dengan donasi pada program sekolah, bantuan *link* ke dunia industri dan pemberian motivasi bagi adik kelasnya. Belum lama ini alumni SMK Negeri 26 Jakarta yang juga mantan Menteri Komunikasi dan Informasi Bapak Tifatul Sembiring juga datang kembali ke sekolah untuk memberikan motivasi dan berbagi pengalaman dengan para siswa.

## **B. Fokus dan Sub Fokus Penelitian**

Penelitian ini difokuskan kepada pemberdayaan guru di SMK Negeri 26 Jakarta, sedangkan sub fokus penelitian ini meliputi, pemberian akses informasi, pemartisipasian dan program pendidikan dan pelatihan di SMK Negeri 26 Jakarta.

## **C. Pertanyaan Penelitian**

1. Bagaimana pemberian akses informasi dalam pemberdayaan guru di SMK Negeri 26 Jakarta?
2. Bagaimana pemartisipasian dalam pemberdayaan guru di SMK Negeri 26 Jakarta?
3. Bagaimana program pendidikan dan pelatihan dalam pemberdayaan guru di SMK Negeri 26 Jakarta?

#### **D. Tujuan Penelitian**

Secara umum, penelitian ini bertujuan menggambarkan pemberdayaan guru yang dilakukan dalam rangka implementasi manajemen berbasis sekolah di SMK Negeri 26 Jakarta.

#### **E. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan akan mendatangkan manfaat bagi pihak-pihak terkait, sebagai referensi bagi permasalahan serupa di masa mendatang. Adapun manfaat penelitian secara lebih jelas adalah sebagai berikut:

1. Secara teoritis:

Dapat menambah ilmu pengetahuan dalam bidang manajemen pendidikan, khususnya dalam hal pemberdayaan masyarakat dalam implementasi manajemen berbasis sekolah agar sekolah lebih mandiri dalam mengelola sekolahnya. Selain itu, agar dapat digunakan sebagai bahan penelitian lebih lanjut untuk penelitian lain dalam bidang manajemen pendidikan.

2. Secara praktis:

a. Bagi Peneliti

Sebagai wahana untuk menambah wawasan dan pengetahuan sekaligus memberikan inovasi dalam pemberdayaan guru dalam implementasi manajemen berbasis sekolah.

b. Bagi Institusi Pendidikan

Sebagai acuan perlunya pemberdayaan gurudalam implementasi manajemen berbasis sekolah sebagai upaya meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pendidikan guna mewujudkan sekolah yang unggul dan berkualitas.

c. Bagi SMK Negeri 26 Jakarta

Sebagai referensi informasi terhadap pentingnya pemberdayaan guru dalam implementasi manajemen berbasis sekolah, sehingga menjadi acuan dalam mewujudkan sekolah yang unggul dan berkualitas.